

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang adalah salah satu negara maju yang berada di Kawasan Asia Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang besar dan mampu bersaing dengan dunia internasional. Saat ini Jepang dikategorikan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia menyusul Amerika Serikat dan China.¹ Kekuatan ekonomi Jepang dipengaruhi oleh kualitas SDM yang unggul dengan indeks pembangunan manusia yang mencapai angka 0,9 atau dikategorikan hampir sempurna.² Sayangnya keunggulan SDM yang dimiliki oleh Jepang tidak sebanding dengan angka kelahiran yang dibutuhkan oleh Jepang untuk menjaga angka populasi normal. Fenomena menurunnya populasi di Jepang menyebabkan negara ini mengalami krisis demografi.³

Fenomena krisis demografi yang terjadi di Jepang diakibatkan karena masyarakat Jepang cenderung memiliki angka harapan hidup yang tinggi sehingga jumlah penduduk lanjut usia menjadi lebih banyak, namun angka kelahiran cenderung menurun setiap tahunnya.⁴ Pada tahun 2022 penduduk Jepang

¹ The World Bank, *GDP Growth Country (Annual %)*, last modified 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>. (27/03/2023. 05.17 WIB)

² Mutia Zahra Nabila, 2021, *Krisis Populasi Tenaga Kerja Produktif Di Jepang Pada Tahun 2014-2019*, Skripsi. Jakarta: Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Universitas Darma Persada.

³ Diva Devita Syaputra, 2022, *Pengaruh Koreika Shakai Terhadap Perkembangan Demografi Di Jepang*. Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Darma Persada.

⁴ Kurniawaty Iskandar, *Japan Aging Issues, Long Term Care Insurance (LTCI) and The Migration of Indonesian Nurse to Enter Japan Labor Market*, Journal of Strategic and Global Studies, Vol 2, No. 2 (2020).

mengalami penurunan kelahiran sebesar 5% dan penurunan jumlah populasi yang mencapai 0,4% dengan jumlah total populasi sebesar 125.124.989 orang⁵.

Dengan menurunnya jumlah populasi tentunya juga akan berpengaruh terhadap berbagai sektor seperti sosial, politik, hingga ekonomi. Dalam sektor ekonomi, penurunan jumlah populasi dapat berdampak pada permintaan konsumen dan menurunnya jumlah produksi. Lebih lanjut pemerintah Jepang juga khawatir krisis demografi akan mengancam perusahaan maupun industri karena berkurangnya tenaga kerja ahli dalam berbagai sektor⁶.

Salah satu upaya yang coba dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi krisis tenaga kerja adalah dengan membentuk berbagai kebijakan dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu kebijakan Jepang adalah melalui kebijakan Visa SSW (*Specified Skill Workers*). Visa SSW atau biasa dikenal dengan istilah *Tokutei Ginou* merupakan program pemerintah Jepang untuk memberikan izin tinggal bagi para pekerja asing yang memiliki ketrampilan khusus⁷. Pada dasarnya, program SSW ini ditetapkan oleh pemerintah Jepang untuk memperluas akses lingkungan kerja dan melindungi para tenaga kerja asing. Penetapan kebijakan terkait tenaga kerja asing ini diinisiasikan oleh pemerintah Jepang karena pada program sebelumnya masih terdapat banyak tenaga kerja yang masuk ke Jepang melalui jalur ilegal dan laporan terkait

⁵ Jessie Yeung and Junko Ogura, *It's "Now or Naver" to Reverse Japan's Population Crisis, Prime Minister Says* (Tokyo, Japan, 2023), <https://edition.cnn.com/2023/01/23/asia/japan-kishida-birth-rate-population-intl-hnk/index.html> (30/03/2023. 03.30 WIB)

⁶ Yihan Liu and Niklas Westelius, *The Impact of Demographics on Productivity and Inflation in Japan*, *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, Vol 8, No. 2 (2017).

⁷ Mochammad Fiandi Fauzan, 2023, *Implementasi Kebijakan SSW (Specified Skilled Workers) Jepang-Indonesia Di Bidang Keperawatan Sebagai Respon Masalah Koureika*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

kekerasan pada tenaga kerja asing yang terus meningkat. Dengan adanya kebijakan baru dalam bidang imigrasi tenaga kerja, pemerintah Jepang berharap nantinya tenaga kerja asing yang bekerja melalui program SSW akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti tenaga kerja lokal lainnya.⁸

Dalam implementasinya, pemerintah Jepang bekerjasama dengan berbagai negara seperti Filipina, Vietnam, Kamboja, China serta beberapa negara lainnya termasuk Indonesia.⁹ Dalam kebijakan SSW, pemerintah Jepang membuka 14 sektor seperti bidang manufaktur, konstruksi, keperawatan, pelayanan dan lainnya. Dalam rangka kerja awal, pemerintah Jepang memiliki target untuk mendatangkan tenaga kerja asing sebanyak 345.150 pekerja yang dibagi dalam 14 sektor.¹⁰

Hubungan kerjasama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia terkait Visa SSW dimulai sejak tanggal 25 Juni 2019 melalui penandatanganan *Memorandum of Cooperation on A Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with Status of Residence of Specified Skilled Workers* (MoC SSW) yang diwakili oleh Duta Besar Masafumi Ishii sebagai perwakilan Jepang dan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri sebagai perwakilan Indonesia.¹¹ Dalam kerjasama tersebut, pemerintah Indonesia

⁸ Febie Nur Arief Aeni, *Japan's Foreign Policy on Migrant Workers: Implementation of The Specified Skilled Workers (SSW) Policy in Overcoming Labor Crisis*, *Mediasi Journal of International Relations*, Vol 5, No. 1 (2022).

⁹ Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Indonesia, *Informasi Terkait Specified Skill Worker*, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, last modified 2019, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/faq-ssw-jepang> (11/03/2023. 01.16 WIB).

¹⁰ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Signing of Memorandum of Cooperation between Japan and Indonesia on a Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of 'Specified Skilled Worker*, Press Release, no. 2 (2019): 1–7, https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002489.html.

¹¹ BP2MI, *Dubes RI Untuk Jepang Dorong Pekerja Migran Indonesia Tangkap Peluang Kerja SSW*, Bp2mi.Go.Id.

menetapkan target untuk dapat mengirimkan 20% atau sekitar 69.000 pekerja dari total kebutuhan tenaga kerja di Jepang.¹²

Selain pengiriman TKI ke Jepang, Pemerintah Indonesia juga telah berupaya mengirimkan tenaga kerja ke berbagai negara di dunia seperti Suriname, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, hingga Singapura dan beberapa negara lainnya di dunia. TKI yang dikirimkan pada negara-negara tersebut cenderung ditempatkan pada sektor-sektor pekerjaan non-formal seperti asisten rumah tangga, jasa pengiriman makanan, dan berbagai pekerjaan non-formal lainnya. Pada 2016 pengiriman TKI ke negara-negara tersebut mulai mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia melalui BNP2TKI mulai mengubah fokus pengiriman TKI untuk mengisi sektor pekerjaan formal dengan tujuan melindungi TKI dari berbagai macam bentuk pelanggaran (kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, jam kerja yang tidak sesuai dan lainnya)¹³

Sejak tahun 2016, pemerintah Indonesia mulai menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara yang membutuhkan tenaga kerja berketerampilan seperti Belanda, Australia, Korea Selatan hingga Jepang. Penelitian ini akan berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung pengiriman TKI ke Jepang karena jika dibandingkan dengan negara lain, pemerintah Jepang cenderung memiliki sektor pekerjaan yang lebih banyak, jika pada negara lain seperti Korea Selatan

¹² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Indonesia-Jepang Bahas Penempatan Pekerja Migran Dan Program Pemagangan*, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, last modified 2021, accessed April 4, 2024, <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-jepang-bahas-penempatan-pekerja-migran-dan-program-pemagangan>.

¹³ Ade Eka Afriska, T. Zulham, and Dawood. Taufiq C., "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap Pdb per Kapita Di Indonesia," *Jurnal Persepektif Ekonomi Darussalam* 4, no. September (2018): 231–248, <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/12947>.

membuka tiga sektor pekerjaan seperti manufaktur, *shipbuilding*, dan perikanan. Pemerintah Jepang membuka 14 sektor pekerjaan. Pemilihan Jepang sebagai negara tujuan juga dikarenakan Pemerintah Jepang memiliki permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja yang berasal dari Indonesia.

Menurut Yoshihiro Murai Gubernur Prefektur Miyagi, salah satu alasan pemerintah Jepang memilih Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja dalam program SSW adalah karena tenaga kerja yang berasal dari Indonesia dianggap lebih mudah beradaptasi, jujur, dan rajin dalam melakukan pekerjaan.¹⁴ Pemerintah Jepang mengakui bahwa tenaga kerja yang berasal dari Indonesia sebelumnya pada program pemagangan telah membawa citra yang positif bagi Jepang. Dalam skema *Technical Intern Training Program (TITP)* atau program magang yang diberlakukan sebelumnya, tenaga kerja yang berasal dari Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor seperti perikanan, kelautan, industri manufaktur dan sektor lainnya.¹⁵

Adanya peluang terkait pengiriman tenaga kerja tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan kepada para calon tenaga kerja Indonesia atau CPMI yang berminat bekerja ke Jepang terutama melalui skema SSW, salah satunya dengan memberikan sosialisasi terkait proses atau skema pengiriman tenaga kerja pada program Visa SSW melalui web resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibawah Kementerian Ketenagakerjaan

¹⁴ Widya Michella, *Ini Alasan Jepang Lebih Pilih Tenaga Kerja Asing Dari Indonesia*, *SINDO News* (Indonesia, July 2023), <https://nasional.sindonews.com/read/1162017/15/ini-alasan-jepang-lebih-pilih-tenaga-kerja-asing-dari-indonesia-1690481258>.

¹⁵ Kementerian Luar Negeri, *KJRI Osaka Dorong Penempatan PMI Trampil Ke Jepang Melalui Skema SSW*, *Kemlu.Go.Id*.

Republik Indonesia serta melalui Kementerian Luar Negeri.¹⁶ Pada bulan Juni tahun 2023, jumlah tenaga kerja Indonesia yang berhasil bekerja di Jepang melalui skema SSW mencapai 25.337.¹⁷ Pengiriman tersebut masih jauh lebih sedikit dari target Indonesia untuk dapat mengisi 20% kuota SSW yang tersedia. Dengan minimnya penempatan tenaga kerja melalui program SSW menjadi tantangan baru bagi pemerintah Indonesia maupun Jepang untuk meningkatkan upaya yang menarik bagi calon tenaga kerja agar tertarik dengan program SSW. Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang memiliki target untuk memperpanjang kontrak kerjasama SSW pada bulan Juni 2024 hingga 2029 mendatang dengan tambahan empat sektor baru termasuk industri angkutan kereta api, kendaraan bermotor, bidang kehutanan dan pengolahan kayu.¹⁸ Pemerintah Jepang juga berencana untuk menambah kuota SSW I menjadi 820.000 pekerja untuk tahun 2024-2029.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian terkait hubungan Indonesia-Jepang dalam penempatan TKI melalui program SSW menarik untuk dibahas. Penelitian ini akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan kedua negara untuk memaksimalkan program SSW. Baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia sama-sama saling membutuhkan kerjasama untuk dapat menghadapi

¹⁶ Hery Sudarmanto, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI)*, Journal of Education and Language Research 8721, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/3619/2663>.

¹⁷ BP2MI, *Dubes RI Untuk Jepang Dorong Pekerja Migran Indonesia Tangkap Peluang Kerja SSW*.

¹⁸ Dimas Choirul ARM, *Perpanjang MoC SSW Dengan Jepang, Kemnaker Berharap Banyak Peserta Dapat Kerja*, Jawa Pos, last modified 2024, <https://www.jawapos.com/nasional/014571512/perpanjang-moc-ssw-dengan-jepang-kemnaker-berharap-banyak-peserta-dapat-kerja>.

¹⁹ Sekretariat Jenderal Kemnaker, “Kemnaker Berharap Banyak Peserta SSW Bekerja Di Jepang,” *Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia* (Tokyo, Japan, April 2024), <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-berharap-banyak-peserta-ssw-bekerja-di-jepang>.

tantangan demografi yang terjadi. Jepang yang membutuhkan tambahan tenaga kerja di berbagai sektor, dan Indonesia yang membutuhkan tambahan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran akan menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Melalui teori interdependensi, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana hubungan ketergantungan antara Jepang dan Indonesia dalam penempatan TKI pada program SSW, serta melalui konsep *dual labor market* penelitian ini dapat menggambarkan alasan dan upaya pemerintah Indonesia mendukung adanya pengiriman TKI ke Jepang, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menarik tenaga kerja internasional dalam program SSW.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan sebuah pertanyaan terkait "Bagaimana Hubungan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam mendukung penempatan TKI pada program SSW terutama selama kurun waktu tahun 2019 hingga Mei 2024?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana Hubungan pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam mendukung penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Program *Specified Skilled Workers* (SSW) terutama dalam kurun waktu 2019 hingga Mei 2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi terutama dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya terkait ketenagakerjaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dan sumber rujukan dalam penelitian lanjutan pada bidang lain maupun penelitian serupa di negara lain.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kebijakan *Specified Skill Worker Visa* yang dapat digunakan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat Indonesia yang memiliki minat untuk bekerja di Jepang melalui program *Specified Skill Worker Visa*.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan pencarian informasi dan sumber dari penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan sesuai dengan topik yang akan diangkat. Berikut beberapa hasil pencarian informasi dan sumber yang berasal dari karya ilmiah yang telah penulis dokumentasikan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh **Nur Fadillah Tombalisa, Enny Fathurachmi, dan Rendy Wirawan (2022)** dengan judul **“Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan dalam Program Tokutei Ginou**

tahun 2019,”²⁰ Penelitian ini mengkaji mengenai kerja sama bilateral yang terjalin antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, membahas mengenai awal mula dan perkembangan transformasi program ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Jepang, dalam hal ini adalah *Tokutei Ginou*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak positif dari program *Tokutei Ginou* yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja di Jepang, membuka lapangan kerja baru bagi pekerja Indonesia dengan keterampilan yang lebih terspesialisasi, mendukung pertumbuhan ekonomi baik bagi negara Jepang maupun Indonesia, serta memperkuat kerja sama bilateral kedua negara antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah persamaan topik kajian, yaitu mengenai kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang. Perbedaannya terletak pada rentang waktu penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya hanya terbatas pada dampak adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam menjalin hubungan kerjasama melalui program *Tokutei Ginou* bagi kedua negara dan keterbatasan waktu hanya pada sepanjang tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini, penulis akan lebih berfokus pada kajian mengenai program *Specified Skilled Workers (SSW)* dengan rentang waktu tahun 2019 hingga bulan Mei 2024.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh **Encum Sumianti (2022)** dengan judul ***Indonesia-Japan Cooperation in Labour Migration to Improve the***

²⁰ Nur Fadhilla Tombalisa, Enny Fathurahmi, and Rendy Wirawan, “Kerjasama Jepang Dan Indonesia Di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Program Tokutei Ginou Tahun 2019,” *Interdependence Journal of International Studies* 3, no. 2 (2022): 76–81.

Competitiveness of Indonesian Migrant Workers,”²¹ Penelitian ini menganalisa mengenai kerja sama Indonesia dan Jepang dalam migrasi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia. Penelitian pada jurnal ini didasari oleh adanya *Global Compact for Migration 2018* mengenai panduan bagi negara-negara untuk menentukan kebijakan dan tindakan guna meningkatkan kualitas manajemen migrasi internasional sehingga dapat terwujud migrasi yang menguntungkan pekerja migran Indonesia sebagai negara pengirim, dan bagi negara penerima. Korelasi dengan penelitian oleh penulis adalah persamaan topik mengenai ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang, juga penggunaan metode kualitatif. Perbedaan penelitian pada fokus penelitian dan teori serta konsep yang digunakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Rizki Fauzan dan Satwika Pramatsatya (2022)** dengan judul “**Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada *Technical Intern Training Program***,”²² Jurnal ini mengkaji mengenai upaya Jepang untuk melindungi pekerja migran dalam Program Pelatihan Magang Teknis atau biasa dikenal dengan *Technical Intern Training Program* (TITP) dan menganalisis kepatuhan terhadap peraturan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi pekerja migran, namun peraturan dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mengurangi eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Persamaan

²¹ Encum Sumiati, “Indonesia-Japan Cooperation in Labour Migration To Improve the Competitiveness of Indonesian Migrant Workers,” *Interdisciplinary Social Studies* 1, no. 8 (2022): 1022–1030.

²² Muchammad Rizki Fauzan and Satwika Paramasatya, “Upaya Jepang Dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada Technical Intern Training Program,” *Journal of International Relations* 8, no. 2 (2022): 239–247, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

pembahasan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai negara Jepang dalam bidang ketenagakerjaan, perbedaannya terletak pada perbedaan fokus penelitian, dimana penulis berfokus pada program SSW sebagai skema oleh Indonesia dalam pengiriman TKI ke Jepang.

Keempat, penelitian oleh **Putri Elsy (2018)** dengan judul **“Fenomena Tenaga Kerja Asing di Jepang Dewasa Ini,”**.²³ Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena peningkatan jumlahnya pekerja asing di Jepang sebagai respons terhadap perubahan demografi negara tersebut, seperti rendahnya angka kelahiran dan populasi menua. Menurunnya angkatan kerja di Jepang telah menciptakan peluang bagi pekerja dari negara-negara seperti Indonesia untuk tinggal dan bekerja di Jepang. Persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian oleh penulis adalah pembahasan mengenai ketenagakerjaan dan metode analisis dengan kualitatif. Perbedaannya adalah fokus penelitian penulis mengenai Tenaga Kerja Indonesia, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam menghadapi tantangan demografi dengan mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh **Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono (2023)** dengan judul **“Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya,”**.²⁴ Penelitian ini menganalisis mengenai status tenaga kerja migran Indonesia dan bagaimana pemerintah Indonesia

²³ Putri Elsy, “Fenomena Tenaga Kerja Asing Di Jepang Dewasa Ini,” *Journal of Japanese Area Studies* 6, no. June 2018 (2018).

²⁴ Dhanny Safitri and Ali Abdullah Wibisono, “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan Dan Perlindungannya,” *Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023): 741–769.

berupaya dalam melindungi pekerja migran. Keamanan dan perlindungan pekerja migran masih menjadi perhatian. Ada banyak kasus penganiayaan terhadap pekerja imigran, terutama pekerja berketerampilan rendah dan tidak berdokumen (*undocumented workers*). Adapun korelasi penelitian pada jurnal ini dengan penelitian oleh penulis adalah membahas mengenai kebijakan dan upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan para TKI atau pekerja migran Indonesia. Perbedaannya adalah pada fokus upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh **Annisa Desyana dan Sidik Jatmika (2023)** dengan judul **“Japan-Indonesia Cooperation in Dealing with the Labour Crisis in Japan,”**²⁵ Penelitian ini membahas mengenai tantangan Jepang yang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan mengancam perekonomiannya. Kekurangan ini memaksa pemerintah Jepang mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi masalah ketimpangan tenaga kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Jepang mulai menjalin kerjasama ketenagakerjaan dengan Indonesia untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di Jepang. Indonesia saat ini menjadi negara pengirim TKI terbesar ketiga ke Jepang, setelah Vietnam dan Filipina. Hal ini dibuktikan dengan kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang dianggap memenuhi persyaratan untuk bekerja di Jepang. Korelasi penelitian pada jurnal ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan pembahasan terkait topik ketenagakerjaan

²⁵ Annisa Desyana and Sidik Jatmika, “Japan-Indonesia Cooperation in Dealing with the Labour Crisis In,” *Crafting Innovation for Global Benefit* 3, no. 1 (2023): 121–133.

antara Indonesia dan Jepang. Penelitian sebelumnya berfokus pada kerjasama Visa SSW sebagai upaya mengatasi krisis tenaga kerja di Jepang. Perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam mengirimkan TKI ke Jepang dengan kurun waktu yang lebih panjang 2019-2024.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh **Mochammad Fiandi Fauzan (2023)** dengan judul **“Implementasi Kebijakan SSW (*Specified Skill Worker*) Jepang-Indonesia di Bidang Keperawatan Sebagai Respon Masalah Koureika”**.²⁶ Penelitian ini membahas terkait implementasi kebijakan SSW terutama pada bidang keperawatan. Adanya fenomena *Kourika* atau *aging population* di Jepang menyebabkan kekurangan tenaga kerja dalam bidang ahli. Banyaknya jumlah penduduk yang lanjut usia menyebabkan permintaan sektor bidang kesehatan dan keperawatan menjadi meningkat. Sebagai negara yang menjalin kerjasama dalam visa SSW, Indonesia mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memberikan pelatihan bagi pekerja bidang keperawatan dengan membentuk BNP2TKI dengan tujuan para pekerja yang akan dikirimkan ke Jepang memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah Jepang. Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis terkait dengan pengiriman tenaga kerja melalui skema visa SSW, perbedaannya pada fokus penelitian yang sebelumnya berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja kesehatan, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung semua sektor pekerjaan Visa SSW.

²⁶ Fauzan, “Implementasi Kebijakan SSW (Specified Skilled Workers) Jepang-Indonesia Di Bidang Keperawatan Sebagai Respon Masalah Koureika.”

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil
1.	<p>Nur Fadillah Tombalisa, Enny Fathurachmi, dan Rendy Wirawan (2022)</p> <p>"Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan dalam Program Tokutei Ginou tahun 2019"</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif-Deskriptif</p> <p>Pendekatan: Kerjasama Internasional</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program <i>Tokutei Ginou</i> meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jepang, menciptakan lapangan kerja bagi pekerja Indonesia dengan keterampilan yang lebih terspesialisasi, mendukung produktivitas ekonomi Jepang dan Indonesia, serta memperkuat kerja sama antara Jepang dan Indonesia.</p>
2.	<p>Encum Sumianti (2022)</p> <p><i>"Indonesia-Japan Cooperation in Labour Migration to Improve the Competitiveness of Indonesian Migrant Workers"</i></p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif-Deskriptif</p> <p>Pendekatan: Kerjasama Bilateral</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama ekonomi melalui Pekerja Migran Indonesia melalui BNP2TKI dan Japan International Welfare Corporation (JICWELS) sebagai bentuk tanggungjawab Jepang dalam menampung para Pekerja Migran Indonesia.</p>
3.	<p>Muhammad Rizki Fauzan dan Satwika Pramasatya (2022)</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif-Deskriptif</p> <p>Pendekatan:</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan tenaga kerja asing oleh Jepang merupakan bentuk ratifikasi Jepang pada ILO mengenai Standar Ketenagakerjaan No. 49 Tahun 1947 tentang Pengupahan menguatkan UU Upah</p>

	<p>“Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada <i>Technical Intern Training Program</i>”</p>	<p>Teori Kepatuhan</p>	<p>Minimum no. 137 Tahun 1959, dan UU Keselamatan dan Kesehatan Industri No. 57 Tahun 1972. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kasus eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja asing.</p>
4.	<p>Putri Ely (2018)</p> <p>“Fenomena Tenaga Kerja Asing di Jepang Dewasa Ini”</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif-Deskriptif</p> <p>Pendekatan: Kerjasama Internasional, dan Konsep Demografi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari perubahan demografi dan kekurangan tenaga kerja di Jepang adalah jumlah orang asing yang tinggal dan bekerja di Jepang semakin meningkat. Para pekerja asing ini mengisi berbagai lowongan di Jepang, baik sebagai pekerja terampil maupun tidak terampil. Menurunnya jumlah pekerja menjadi peluang bagi pekerja Indonesia untuk tinggal dan bekerja di Jepang</p>
5.	<p>Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono (2023)</p> <p>“Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya”</p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif - Deskriptif</p> <p>Pendekatan: <i>Human Security</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran masih merasa tidak aman atau terancam keselamatannya, terutama pada aspek keselamatan diri, keselamatan kesehatan, dan keamanan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia telah menunjukkan penerapan prinsip dan pendekatan keamanan manusia dalam strategi mereka. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja migran, salah satunya adalah dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara mitra untuk memberikan kepastian hukum bagi</p>

			setiap pekerja.
6.	Annisa Desyana dan Sidik Jatmika (2023) <i>"Japan-Indonesia Cooperation in Dealing with the Labour Crisis in Japan"</i>	Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif Pendekatan: Hubungan Internasional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Jepang dan Indonesia dianggap dapat mengatasi krisis ketenagakerjaan di Jepang, hal ini mendorong pemerintah Jepang untuk merevisi kebijakan imigrasinya yang memudahkan pekerja Indonesia masuk ke Jepang, memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada pekerja Indonesia serta menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk skema JIEPA dan SSW antara Indonesia dan Jepang.
7	Mochammad Fiandi Fauzan (2023)	Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif Pendekatan: Implementasi Kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam sektor ketenagakerjaan membawa keuntungan bagi kedua negara, sebagai negara pengirim, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung dan mendorong para calon TKI dengan memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja agar memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan melalui pembentukan BNP2TKI.

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Teori Interdependensi

Teori interdependensi merupakan sebuah teori turunan yang bersumber dari neo-liberalisme.²⁷ Teori interdependensi memandang bahwa negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk dapat bertahan dari sistem internasional yang anarki, asumsi lain mengatakan hegemoni suatu negara dapat digunakan untuk membantu negara-negara *powerless* agar dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui kerjasama yang dapat saling menguntungkan.²⁸

Pasca terjadinya perang dunia kedua, negara yang berhasil melewati perang dunia kedua dan bangkit secara ekonomi merupakan negara-negara yang mengutamakan perdagangan seperti Jepang dan Jerman. Negara industrialis ini memilih untuk menjalin hubungan kerjasama perdagangan dan tenaga kerja dalam lingkup internasional untuk meningkatkan hubungan interdependensi. Dengan adanya hubungan interdependensi dinilai dapat menekan risiko terjadinya konflik atau perang antarnegara.²⁹

Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye beranggapan bahwa saat ini penggunaan militer tidak lagi relevan digunakan sebagai senjata utama dalam hubungan internasional. Adanya kompleksitas isu yang terjadi pada setiap negara mendorong adanya banyak aktor yang dapat terlibat. Robert O. Keohane dan Joseph

²⁷ Teori yang berpandangan bahwa kebebasan individu dan pasar yang bebas merupakan prinsip utama dalam mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Teori ini juga berpendapat bahwa negara-negara yang memiliki kerjasama dan saling ketergantungan dalam aspek perdagangan dan ekonomi akan cenderung memiliki insentif menghindari konflik dan meningkatkan perdamaian.

²⁸ Vinsensio Dugis, 2018, *Teori Hubungan Internasional: Persepektif-Persepektif Klasik*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018) hal.27.

²⁹ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori Dan Pendekatan*, ed. Kamdani and Rianayati Kusmini, 5th ed. (New York: Pustaka Pelajar Offset, 2013).

S. Nye mengenalkan interdependensi kompleks, dimana saat ini negara cenderung berfokus “politik rendah” seperti isu sosial dan ekonomi. Penggunaan negosiasi dan keterlibatan multi aktor seperti perusahaan transnasional, LSM, maupun organisasi lain menjadi poin utama.³⁰ Teori ini menggambarkan ketika suatu negara memiliki hubungan interdependensi yang tinggi dengan negara lain maka kebijakan negara tersebut dapat memberikan efek domino yang lebih luas.³¹

Dalam teorinya, Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye juga memperkenalkan konsep interdependensi kompleks dimana terdapat aktor-aktor yang mendukung terjadinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang seperti perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Dalam praktiknya, perusahaan Jepang yang membutuhkan tenaga kerja dapat secara langsung membuka *open recruitment* melalui mekanisme *Business to Candidate* (B2C), dimana perusahaan dapat secara langsung menyeleksi calon tenaga kerja melalui wawancara dan tes lainnya.³²

Teori interdependensi kompleks milik Robert O Keohane dan Joseph S. Nye ini juga menekankan pada ketergantungan setiap negara dengan negara lainnya dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan lain sebagainya, sehingga mendorong setiap negara untuk melakukan hubungan kerja

³⁰ Keohane, R. O. And Nye, J., (1997). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Dalam Jackson, Robert and Sorensen, Georg, (2014), *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, ed.5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

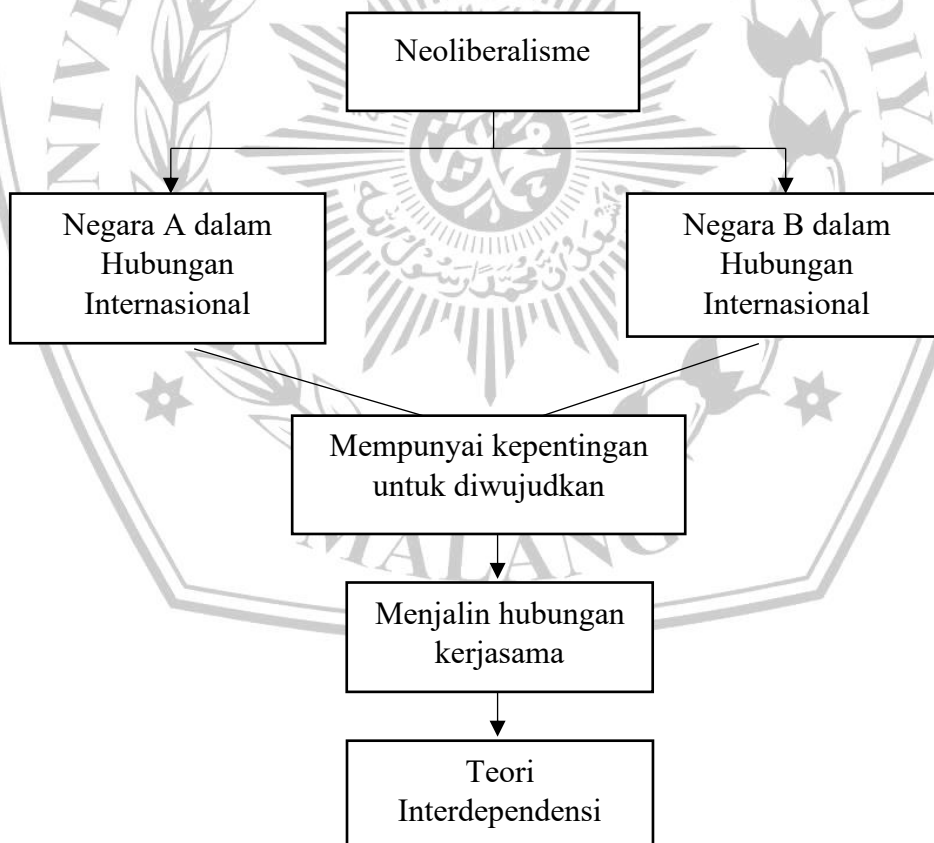
³¹ Thomas Oatley, *Toward a Political Economy of Complex Interdependence*, European Journal of International Relation, Vol. 25, No. 4 (April, 2019), London: SAGE Publications.

³² Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Indonesia, *Informasi Terkait Specified Skill Worker*, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, last modified 2019, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/faq-ssw-jepang>, diakses (16 Agustus 2023, 11.34 WIB).

sama dengan negara-negara lain³³. Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dijalin antara suatu negara dengan negara lainnya adalah dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau biasa disebut sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ke Jepang yang membutuhkan tambahan tenaga kerja asing. Dalam hal ini adalah hubungan kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang. Teori interdependensi memberikan penekanan bahwa negara memiliki ketergantungan satu sama lain dalam hal ekonomi, sehingga kesejahteraan suatu negara dapat dipengaruhi oleh negara lainnya.³⁴

Gambar 1.5.1 Teori Interdependensi

sumber: (Keohane & Joseph, 2013)



³³ M Rosyidin, *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat* (Rajawali Pers, 2020).

³⁴ Jackson and Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori Dan Pendekatan*.

1.5.2 Konsep *Dual Labor Market*

Konsep *dual labor market* yang dicetuskan oleh Michael Piore dan Peter Doeringer berpendapat bahwa migrasi internasional terjadi karena adanya tuntutan/kebutuhan (*demand*) tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu negara modern.³⁵ Migrasi umumnya dilakukan oleh masyarakat suatu negara yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja sehingga banyak warga negara yang mencari peruntungan ke negara maju untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dimana para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melakukan migrasi salah satunya untuk mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih tinggi³⁶. Dalam era globalisasi ini, migrasi TKI telah mengalami perubahan signifikan, jika pada periode sebelumnya migrasi tenaga kerja hanya dilakukan pada bidang-bidang dengan *low skilled* seperti asisten rumah tangga dan pekerjaan kasar lainnya, namun saat ini pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga mulai diisi dengan tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi seperti dalam sektor keperawatan, industri, hingga manufaktur. Seiring dengan kemudahan perpindahan barang maupun jasa dalam melintasi batas negara membuat migrasi menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat³⁷.

³⁵ Peter B. Doeringer and Michael J. Piore, 1985, *Internal Labor Markets and Manpower Analysis: With a New Introduction*, British: Routledge Publish, dalam Muhamaimin Zuhair Achsin, *Teori Teori Migrasi Internasional* (Malang: UB Press, 2021), https://books.google.co.id/books/about/Teori_Teori_Migrasi_Internasional.html?id=T55BEAAQBAJ&redir_esc=y hal 40.

³⁶ Mita Noveria and Haning Romdiati, "Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 71–84.

³⁷ Mita Noveria, "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12, no. 1 (2017): 25–38.

Adanya pertumbuhan industri di suatu negara tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Namun, ketersediaan tenaga kerja di negara tersebut tidak selalu mencukupi dalam hal jumlah dan kualitas. Hal ini mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja internasional. Konsep *dual labor market* menjelaskan fenomena ini dengan meneliti faktor-faktor yang menarik (*pull factor*) dan mendorong (*push factor*) seseorang untuk melakukan migrasi. Faktor penarik (*pull factor*) mengacu pada peluang yang ditawarkan oleh negara tujuan, seperti gaji yang lebih tinggi, peluang kerja yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Faktor pendorong (*push factor*) mengacu pada kondisi yang mendorong seseorang untuk meninggalkan negara asal, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan peluang pendidikan dan pelatihan yang terbatas. Konsep *dual labor market* menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi di negara pengirim, tetapi juga oleh kebutuhan dan peluang di negara tujuan.³⁸

Pada konsep *dual labor market* yang mana menyatakan pasar tenaga kerja terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori primer dan sekunder. Pada kategori primer dideskripsikan para pekerja dalam kategori ini mempunyai pekerjaan yang penghasilannya lebih baik, pekerjaan yang bagus, memiliki karir yang lebih aman dan ke jenjang karir yang jelas. Pada kategori sekunder dideskripsikan para pekerja yang memiliki penghasilan rendah, lingkungan kerja yang tidak baik, mudah

³⁸ Muhamaimin Zulhair Achsin, 2021. *Teori Teori Migrasi Internasional*, Malang: UB Press.

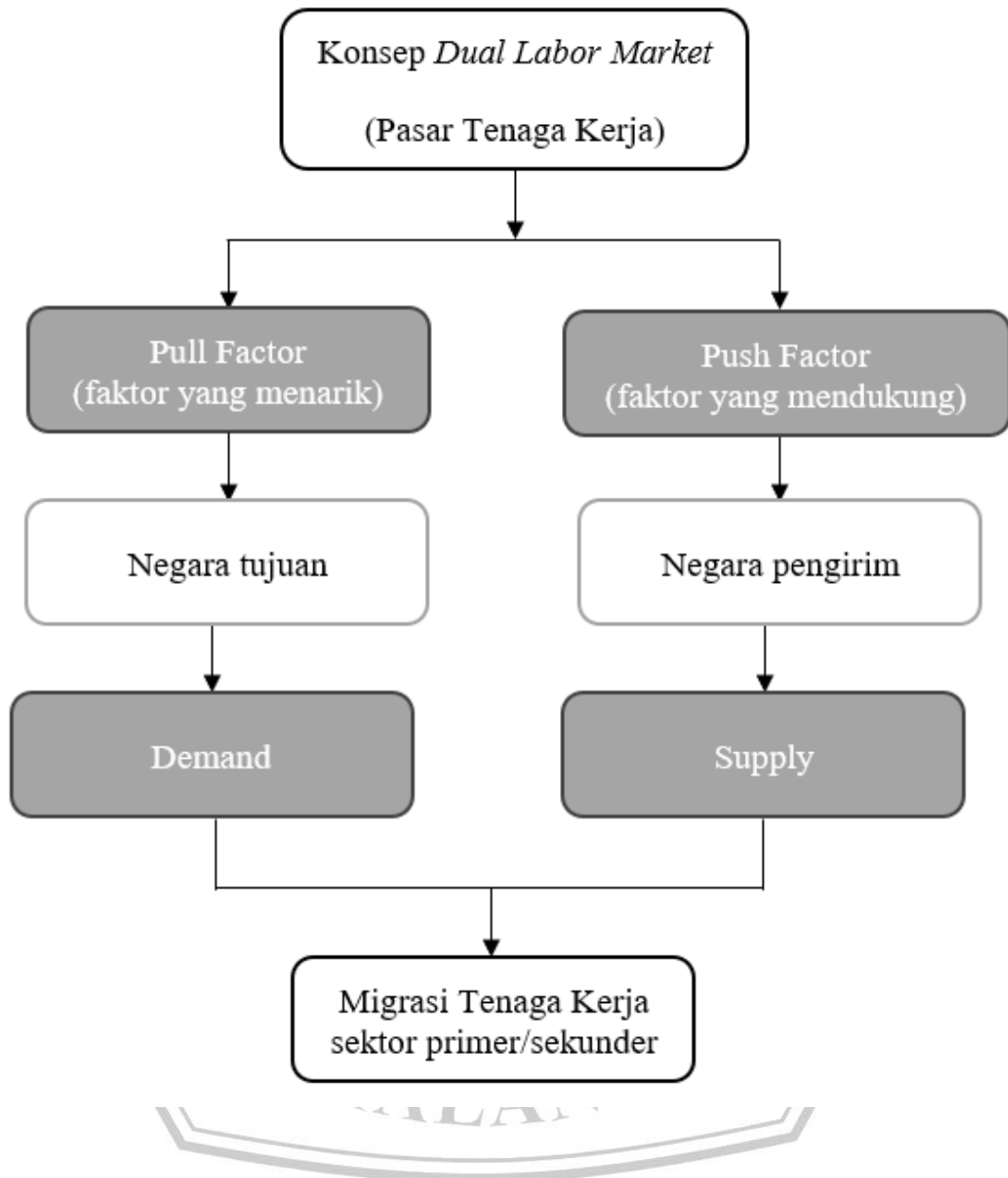
dipecat dan tidak ada jenjang karir yang jelas seperti pekerjaan makanan cepat saji, pekerja ritel, pelayan, penata taman, pekerja rumah tangga, dan sebagainya.³⁹

Berdasarkan konsep ini, sangat wajar apabila terjadi migrasi tenaga kerja yang berasal dari negara yang memiliki gaji/upah yang lebih kecil dengan pertumbuhan ekonomi negara yang lambat menuju negara dengan gaji/upah yang lebih besar dengan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih stabil.⁴⁰ Dalam konteks ini, Jepang membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi, hal ini dilakukan untuk dapat mengimbangi kekurangan tenaga kerja pada sektor tertentu, seperti sektor pertanian, sektor jasa, hingga sektor manufaktur. Sementara itu, Indonesia memiliki keunggulan dalam bidang sumber daya manusia dengan kemampuan atau keterampilan spesifik yang siap bekerja di bidang tersebut.

³⁹ Andrzej Klimczuk, "Dual Labor Market," *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies* (2016): 1–3.

⁴⁰ Noveria and Romdiati, "Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka."

Gambar 1.5.2 Konsep *Dual Labor Market*
Sumber: (Peter B. Doeringer and Michael J. Piore, 1985)



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana tipe dalam penelitian ini menggunakan cara penelitian dengan menggambarkan keadaan ilmiah suatu objek maupun subjek tertentu (baik yang bersifat individu, lembaga, masyarakat, maupun lainnya) berdasarkan pada fakta-fakta yang ada.⁴¹ Metode ini juga memungkinkan penulis untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa secara cermat dan rinci, sehingga dapat diperoleh pemahaman terhadap suatu isu yang telah atau sedang terjadi. Jenis penelitian deskriptif ini memiliki ciri pada setiap penelitiannya berfokus pada berbagai pemecahan masalah yang ada baik pada masa sekarang maupun permasalahan aktual, serta data yang akan digunakan pada awalnya harus disusun, dijelaskan untuk kemudian di analisa.⁴²

1.6.2 Metode Analisis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan metode analisa studi interaktif. Metode ini akan menjelaskan terkait urutan atau serangkaian peristiwa secara teratur.⁴³ Pada penelitian ini analisa studi interaktif dimulai dari munculnya fenomena krisis demografi yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja ahli di Jepang, dan permasalahan tingginya pengangguran di Indonesia, kemudian penelitian ini akan menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung pengiriman tenaga kerja ke Jepang dan bagaimana

⁴¹ Moleong Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 132

⁴² Nasution, 2013. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, hlm 61

⁴³ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

upaya Jepang dalam menarik TKI untuk bekerja di Jepang pada program SSW, hubungan kedua negara ini dapat dijelaskan melalui teori inderdependensi dan konsep *dual labor market*.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik yang bersifat deduktif. Penggunaan teknik ini didasarkan pada rumusan masalah penelitian yang berusaha dijawab melalui sebuah premis atau pernyataan umum dan akan mengarah pada premis khusus yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji validitas sebuah teori melalui uji hipotesis yang dianalisa.⁴⁴

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data sekunder. Data ini berfungsi untuk menambah pengetahuan peneliti melalui data faktual yang kemudian akan memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumentasi.

Studi kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data berbagai sumber sekunder seperti skripsi, artikel, laporan resmi pemerintahan, jurnal, buku, dan berbagai sumber penelitian lainnya yang terkait dengan data penelitian. Data yang dipilih oleh peneliti merupakan data yang dapat dicek validitasnya sebagai pendukung penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 11th ed. (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 1991), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=308844#>.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk berfokus pada rentang waktu tahun 2019 - Mei 2024. Rentang waktu ini dipilih karena pemerintah Indonesia dan Jepang resmi memberlakukan program SSW pada tahun 2019 dengan kontrak kerjasama selama 5 tahun dan akan berakhir pada Juni 2024, sehingga penelitian ini akan berusaha menganalisa kekurangan dan kelebihan program SSW untuk kedepannya.

b. Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam menarik TKI untuk bekerja di Jepang, dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung pengiriman TKI ke Jepang pada program SSW sehingga dapat tercipta hubungan interdependensi.

1.7 Argumen Pokok

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke Jepang melalui program *Specified Skilled Workers Visa* terutama selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2024 penting untuk diteliti, hal ini dikarenakan program SSW mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam berbagai sektor pekerjaan yang dibutuhkan oleh Jepang. Pemerintah Indonesia berharap melalui hubungan kerjasama dengan Jepang dalam bidang SSW dapat membawa masyarakat Indonesia mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di Jepang, namun sayangnya

jumlah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang masih jauh dari target yang ditentukan pemerintah atau sekitar 20% dari total kebutuhan tenaga kerja.

Melalui teori interdependensi kompleks milik Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, penelitian ini akan menjelaskan bahwa program SSW dapat menciptakan sebuah hubungan ketergantungan antara Indonesia dan Jepang, dimana Jepang membutuhkan tenaga kerja terampil dan Indonesia memiliki jumlah sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga melalui kerjasama ini, kedua negara akan saling mendapatkan keuntungan. Selain itu, konsep *dual labor market* akan berusaha menjelaskan apa saja *pull factor* (faktor yang menarik) dari Jepang sebagai negara penerima TKI dan apa saja *push factor* (faktor yang mendorong) TKI untuk melakukan migrasi ke Jepang baik itu dalam sektor pekerjaan primer maupun sektor pekerjaan sekunder.

Asumsi dari penelitian ini adalah kurangnya informasi dan pengetahuan calon TKI terhadap program SSW membuat jumlah pengiriman TKI ke Jepang masih jauh dari target yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan dan fasilitas pengiriman TKI ke Jepang melalui program skema SSW serta bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam meningkatkan fasilitas untuk menarik minat TKI bekerja di Jepang melalui skema SSW, sehingga kendala yang dihadapi pemerintah maupun calon TKI dapat dievaluasi dan diperbaiki untuk dapat meningkatkan jumlah pengiriman TKI sesuai dengan jumlah target yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 20% atau sekitar 69.000 pekerja.

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB 1 Pendahuluan</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian a. Manfaat akademis b. Manfaat praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori/Konsep 1.5.1 Teori Interdependensi 1.5.2 Konsep <i>Dual Labor Market</i> 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Teknik Analisa 1.6.4 Teknik Pengumpulan Penelitian 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian a. Batasan Waktu b. Batasan Materi 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penelitian</p>
<p>BAB 2 Dinamika Penerapan Kebijakan Specified Skilled Workers (SSW) di Indonesia</p>	<p>2.1 Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Sektor Ketenagakerjaan 2.2 Program SSW dan Implementasinya di Indonesia 2.3 Faktor Pendukung TKI untuk Migrasi ke Jepang Pada Program SSW</p>
<p>BAB 3 Upaya Pemerintah Jepang-Indonesia Dalam Mendukung Program SSW</p>	<p>3.1 Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mendukung Pengiriman TKI 3.1.1 Program Pelatihan dan Sertifikasi bagi TKI 3.1.2 Program Sosialisasi SSW 3.1.3 Peran LPK dan Pemerintah Dalam Pengiriman TKI ke Jepang 3.1.4 Kerjasama Pemerintah Indonesia</p>

	<p>dengan Lembaga Pendidikan</p> <p>3.2 Upaya Pemerintah Jepang Dalam Menarik Minat TKI</p> <p>3.2.1 Pelatihan Bahasa dan Proses Rekrutmen</p> <p>3.2.2 Masa Tinggal Pekerja SSW</p> <p>3.2.3 Sitem Gaji/Upah dan Jaminan Asuransi</p> <p>3.3 Upaya Perlindungan Hukum Bagi TKI di Jepang</p> <p>3.4 Hubungan Jepang-Indonesia Dalam Program SSW</p>
<p>BAB 4 Penutup</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

